

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desentralisasi akan mendorong terjadinya disparitas fiskal mengingat setiap daerah memiliki kesiapan yang berbeda-beda baik dari segi potensi sumber daya maupun kemampuan manajerial keuangan daerahnya. Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber- sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Sehingga pada gilirannya memicu suatu daerah mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*)

Usaha optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya dalam rangka membiayai pembangunan di daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Namun, usaha daerah untuk meningkatkan kemandiriannya ini ternyata memicu daerah tersebut untuk mengalami *fiscal stress* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah (Suyanto, 2017). Seringkali, penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidaklah cukup untuk membiayai belanja modal ataupun pembangunan di daerahnya. Konsekuensinya, *fiscal stress* yang tinggi akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan daerah.

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah daerah biasanya bergantung pada penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Penurunan kegiatan perekonomian di suatu daerah tentu saja menjadi penyebab berkurangnya PAD tersebut. Penurunan kegiatan perekonomian ini bisa saja disebabkan oleh faktor politik, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, hingga faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti terjadinya bencana alam permasalahan tersebut menyebabkan

perolehan PAD menjadi lebih rendah serta tidak menentu. Pemerintah daerah menjadi memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap Dana Perimbangan dan menimbulkan gejala *fiscal stress*. Berikut disajikan tabel 1.1 yang menggambarkan proporsi PAD dalam komposisi penerimaan daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2017

Tabel 1.1

Kondisi Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2017

NO	KABUPATEN	PAD (Rp)	TOTAL TRANSFER (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	PAD / TRANSFER (%)	TRANSFER /BELANJA (%)
1	Prabumulih	119.192.661	774.375.336	847.874.025	15,39	91
2	Palembang	1.091.704.606	2.307.939.678	3.141.848.659	47,30	73
3	Pagaralam	65.538.892	746.731.718	743.610.050	8,78	100
4	Lubuk Linggau	115.521.940	788.674.051	870.709.076	14,65	91
5	PALI	56.934.788	931.157.394	865.926.980	6,11	108
6	OKU Timur	77.706.784	1.203.395.779	1.289.877.393	6,46	93
7	OKU Selatan	89.506.599	1.222.264.959	989.011.519	7,32	124
8	OKU	172.013.164	1.220.915.676	1.186.374.979	14,09	103
9	OKI	222.961.998	1.630.003.162	2.108.841.620	13,68	77
10	Ogan Ilir	95.711.838	1.076.666.535	1.115.443.316	8,89	97
11	Musi Rawas Utara	57.580.992	725.788.383	677.194.130	7,93	107
12	Musi Rawas	151.594.083	1.395.056.388	1.192.026.377	10,87	117
13	Musi Banyuasin	209.410.036	2.343.603.837	2.340.644.994	8,94	100
14	Muara Enim	226.929.233	1.869.134.760	1.897.083.715	12,14	99
15	Lahat	164.495.178	1.600.519.842	1.408.832.917	10,28	114
16	Empat Lawang	68.806.715	834.543.070	722.850.409	8,24	115
17	Banyuasin	25.984.369	1.880.437.884	1.628.359.459	1,38	115

Sumber : BPK RI . 2019 (diolah)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2017 masih sangat kecil, yaitu kurang dari 12%, sedangkan dana transfer sangat mendominasi kontribusinya terhadap belanja daerah yaitu 101%. Peningkatan proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) selayaknya diharapkan meningkat, dan sebaliknya proporsi transfer menurun. Peningkatan PAD merupakan indikasi peningkatan kemandirian daerah untuk melakukan belanja daerahnya, namun terkadang usaha

pemerintah dalam memenuhi anggaran PAD mengalami hambatan. Pada kenyataannya, sumbangan PAD cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Halim, 2001).

Besarnya dana perimbangan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dianggap kurang mencerminkan akuntabilitas daerah dan justru menyebabkan daerah untuk sulit mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat (Gunara, 2017). Anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah tidak dialokasikan secara efisien karena pemerintah daerah merasa keperluannya untuk melakukan belanja pembangunan selalu dapat diakomodir oleh dana perimbangan. Kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola potensi di daerahnya secara mandiri memang diharapkan mampu meningkatkan PAD sehingga mampu melepaskan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. (Kuncoro, 2015) menyatakan PAD seharusnya menjadi tolok ukur kondisi kemampuan keuangan daerah dalam mengurus rumah tangganya.

Anggaran belanja daerah selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di daerah tersebut. Oleh karena itu setiap daerah yang melaksanakan otonomi dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali setiap potensi penerimaan baru agar ketersediaan dana untuk membiayai belanja daerah tetap tersedia. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana “kue pembangunan” diperbesar, tapi belum menggambarkan bagaimana “kue pembangunan” tersebut didistribusikan secara merata dalam rangka kesejahteraan masyarakat (Fristanto, 2015).

Potensi produk domestik yang cukup baik akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat akan meningkat dan merata. Sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi masyarakat dalam produktivitas menggali sumber potensi yang ada pada daerah, yang berdampak

pada meningkatnya penerimaan daerah, serta mengurangi terjadinya fenomena *fiscal stress*, karena daerah akan dapat membiayai pembangunan daerahnya melalui pemasukan daerah yang dimiliki.

Studi tentang *fiscal stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya, penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Firstanto, 2015). Selain karena tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat yang masih cukup tinggi, dalam tahun-tahun terakhir juga terjadi penurunan nilai pada komoditas pada sektor perkebunan yang menjadi sektor unggulan di Sumatera Selatan. Sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menurun dan berdampak pada perolehan PAD menjadi tidak menentu. Hal ini memicu untuk dilaksanakan penelitian di provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini merupakan upaya memperbaiki hasil studi penelitian sebelumnya dengan mengganti indikator variabel operasional *fiscal stress* dengan ukuran yang diperkenalkan oleh (Arnett, 2011) yaitu Saldo Dana (*fund balance*). *Fund balance* (Saldo Dana = selisih antara penerimaan dan pengeluaran) sangat diberi bobot dalam penentuan indikator *fiscal stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Pemerintah daerah mungkin harus berjuang dalam menghadapi permasalahan finansial, tetapi mereka masih mampu bertahan beroperasi jika memiliki Saldo Dana yang memadai untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah pertumbuhan tingkat belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah pertumbuhan PAD, PDRB, belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada Pertumbuhan PAD, PDRB dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2015 sampai dengan 2017.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan PAD secara parsial terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan PDRB secara parsial terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal secara parsial terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB dan Belanja Modal /pembangunan secara simultan terhadap tingkat *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan kinerja keuangan pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terhadap evaluasi atas kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah

